

KONTEKS MAYORITAS VS. MINORITAS: IMPLIKASINYA TERHADAP STATUS KELEMBAGAAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA DAN AUSTRALIA

Deli Susanti¹, Fakhruddin², Lukman Asha³

^{1, 2, 3} Program Studi Manajemen Pendidikan Islam , Institut Agama Islam Negeri Curup

e-mail: delisusanti.mhs24@iaincurup.ac.id, fakhruddin@iaincurup.ac.id,
asha.lukman@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konteks mayoritas dan minoritas dalam struktur sosial-keagamaan memengaruhi status kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia dan Australia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif komparatif melalui analisis dokumen, penelitian ini membandingkan dimensi status hukum, model pendanaan, otonomi kurikulum, serta strategi kelembagaan yang berkembang dalam kedua konteks negara tersebut. Temuan menunjukkan bahwa di Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim mayoritas, pendidikan Islam memperoleh legitimasi struktural melalui model afirmasi negara yang diwujudkan dalam dukungan regulatif dan pendanaan langsung Kementerian Agama. Kondisi ini memberikan otonomi substantif pada pengembangan kurikulum keagamaan dan memungkinkan lembaga pendidikan Islam menjalankan fungsi integratif antara ilmu agama dan umum tanpa tekanan koersif yang signifikan. Sebaliknya, di Australia, pendidikan Islam beroperasi sebagai lembaga minoritas yang bergantung pada pendanaan pemerintah berbasis akreditasi sekuler, sehingga menghadapi tekanan isomorfik koersif yang kuat. Tekanan tersebut memaksa sekolah Islam mengadopsi struktur, standar, dan kurikulum nasional sebagai syarat kelangsungan kelembagaan, sekaligus mendorong munculnya strategi identitas hibrida untuk menyeimbangkan tuntutan integrasi dan preservasi nilai-nilai Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa status mayoritas atau minoritas merupakan variabel kunci yang menentukan model hubungan negara–agama, bentuk regulasi, tingkat otonomi kurikulum, dan strategi adaptasi kelembagaan pendidikan Islam. Temuan ini berimplikasi pada penguatan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia serta penyusunan strategi keberlanjutan lembaga pendidikan Islam di Australia.

Kata Kunci : Pendidikan Islam; status kelembagaan; konteks mayoritas–minoritas; hubungan negara–agama; teori institusional; isomorfisme; Australia; Indonesia.

Abstract

This study examines how majority–minority religious demographics shape the institutional status of Islamic education in Indonesia and Australia. Employing a comparative qualitative approach through document analysis, the research investigates key dimensions including legal recognition, funding structures, curricular autonomy, and institutional adaptation strategies in both national contexts. The findings indicate that in Indonesia, where Muslims constitute the majority, Islamic educational institutions receive structural legitimacy through a state-affirmation model supported by the Ministry of Religious Affairs. This model grants substantial autonomy in developing religious curricula and enables Islamic schools and madrasahs to integrate religious and general education without significant coercive pressures from the state. In contrast, Australia represents a minority context in which Islamic schools operate as independent institutions that rely heavily on government funding tied to secular accreditation requirements. This reliance generates strong coercive isomorphic pressures, compelling Islamic schools to adopt national curriculum standards and managerial practices to secure institutional legitimacy and financial sustainability. Consequently, Islamic schools in Australia develop hybrid identity strategies that balance the dual demands of integration into the broader educational system and the preservation of Islamic values. The study concludes that majority–minority dynamics serve as a critical determinant of institutional design, shaping the regulatory environment, curricular autonomy, and adaptive strategies of Islamic educational institutions. These findings offer theoretical contributions to state–religion relations and institutional theory while providing practical policy implications for strengthening Islamic education governance in both Indonesia and Australia.

Keywords: Islamic education; institutional status; majority–minority context; state–religion relations; institutional theory; isomorphism; Australia; Indonesia.

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di era modern bukanlah entitas monolitik. Ia hadir dalam beragam bentuk yang sangat dipengaruhi oleh konteks sosio-politik, budaya, dan hukum di mana ia beroperasi. Di seluruh dunia, lembaga-lembaga pendidikan Islam beradaptasi untuk memenuhi dua tujuan yang terkadang bertentangan, tidak selalu merupakan dialektika antara wahyu (teks) dan realitas sosial (konteks) ¹. Faktor paling menentukan dalam realitas sosial tersebut adalah status komunitas Muslim sebagai kelompok mayoritas atau minoritas dalam sebuah negara-bangsa.

¹ Sahin, *New Directions in Islamic Education: Pedagogy and Identity Formation*.

Perbedaan konteks ini antara menjadi arus utama (mayoritas) dan menjadi "yang lain" (minoritas) secara fundamental mengubah *alasan* mengapa lembaga pendidikan Islam didirikan dan *cara* mereka beroperasi. Status kelembagaan mereka, yang mencakup legalitas, model pendanaan, struktur kurikulum, dan hubungan dengan negara, merupakan cerminan langsung dari adaptasi terhadap konteks tersebut.

Di satu sisi, Indonesia hadir sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Pendidikan Islam di sini bukan sekadar "ada", melainkan terinstitusionalisasi secara mendalam dan menjadi bagian integral dari sejarah serta birokrasi negara. Negara, melalui Kementerian Agama, bertindak sebagai penyelenggara, regulator, dan penyandang dana utama bagi ribuan madrasah negeri (MIN, MTsN, MAN), serta turut meregulasi ribuan lembaga swasta yang dikelola oleh organisasi masyarakat sipil seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama^{2 3}. Tantangan bagi lembaga pendidikan Islam di Indonesia bukanlah perjuangan untuk eksistensi, melainkan pertarungan internal seputar modernisasi, relevansi, penjaminan mutu, dan persaingan dengan sekolah sekuler unggulan.

Di sisi lain, Australia merepresentasikan konteks yang sangat kontras. Sebagai negara sekuler-liberal dengan komunitas Muslim sebagai kelompok minoritas yang relatif baru dan beragam secara etnis, pendidikan Islam memiliki misi yang berbeda⁴. Lembaga pendidikan Islam di Australia hampir seluruhnya berstatus swasta (independent), didirikan oleh komunitas sebagai respons defensif untuk *melindungi* identitas agama dan budaya generasi muda dari asimilasi dalam lingkungan sekuler⁵. Status kelembagaan mereka sangat unik: mereka adalah lembaga swasta yang beroperasi dengan otonomi dalam pengajaran agama, namun pada saat yang sama sangat bergantung pada pendanaan publik dari pemerintah. Ketergantungan ini memaksa mereka untuk tunduk pada regulasi negara yang ketat, termasuk kewajiban penuh untuk mengadopsi Kurikulum Nasional Australia yang sekuler⁶.

Studi mengenai pendidikan Islam di Indonesia (seperti karya Azra atau Lukens-Bull) dan di Australia (seperti karya Baga atau Bouma) sudah banyak dilakukan secara terpisah. Namun, studi yang secara *langsung membandingkan* kedua model ini khususnya dalam hal bagaimana status mayoritas/minoritas *secara langsung membentuk* status kelembagaan (legalitas, pendanaan, dan model regulasi) masih terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut. Riset ini berargumen bahwa perbedaan fundamental dalam status kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia dan Australia bukanlah sekadar perbedaan teknis-administratif, melainkan implikasi logis dari status mereka sebagai mayoritas atau minoritas.

Penelitian ini akan menganalisis: Bagaimana status sebagai mayoritas di Indonesia memungkinkan lahirnya model kelembagaan yang "hibrida" (dikelola negara sekaligus swasta) dengan fokus pada relevansi dan modernisasi? Dan bagaimana status sebagai

² Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Milenium III*.

³ Bull, *A Peaceful Jihad: Negotiating Modernity and Modernism in Muslim Education in Indonesia*.

⁴ Baga, *Islamic Schools in Australia: A Study of Identity, Regulation and Community*.

⁵ Bouma, "Being a Muslim in Australia: Diverse, Negotiated and Contested."

⁶ Berglund, "Islamic Education in Secular Societies: A Comparative Perspective."

minoritas di Australia "memaksa" lahirnya model kelembagaan "dualistik" (swasta-religius namun diregulasi ketat oleh negara-sekuler) dengan fokus pada preservasi identitas dan integrasi?

METODE

Jenis Penelitian Kualitatif Komparatif (Comparative Qualitative Study). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang *bagaimana* dan *mengapa* status kelembagaan pendidikan Islam berbeda di dua konteks yang kontras. Dengan Pendekatan: Analisis Kelembagaan Komparatif (Comparative Institutional Analysis). Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan secara mendalam struktur, fungsi, dan tekanan adaptasi kelembagaan di bawah dua rezim sosio-politik (mayoritas dan minoritas). Analisis Dokumen Komparatif (Comparative Document Analysis): Mengumpulkan dan membandingkan dokumen regulasi, kebijakan pendanaan, dan struktur kurikulum resmi dari kedua negara untuk mengisi data di Tabel Variabel Penelitian (Bagian IV) dan memetakan kerangka kerja operasional lembaga. Analisis Kasus Tunggal (Within-Case Analysis) Menganalisis data secara mendalam untuk kasus Indonesia dan Australia secara terpisah. Analisis ini berfokus pada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan awal untuk menghasilkan profil kelembagaan yang komprehensif di masing-masing konteks. Analisis Lintas Kasus (Cross-Case Analysis) Membandingkan profil kelembagaan yang telah dihasilkan dari kedua kasus berdasarkan dimensi variabel penelitian (status hukum, pendanaan, otonomi kurikulum). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan yang signifikan, menjelaskan implikasi dari konteks mayoritas vs. minoritas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan analisis hasil temuan berdasarkan kerangka teori yang telah ditetapkan dan bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara mendalam. Status hukum pendidikan Islam di Indonesia memberikan otonomi kelembagaan yang lebih tinggi dan mengurangi tekanan isomorfik dibandingkan di Australia, di mana pengakuan dikondisikan pada kepatuhan penuh terhadap kerangka sekuler. Status hukum pendidikan Islam di Indonesia ditandai oleh Dualisme Struktural yang secara eksplisit diakui dan diakomodasi melalui dua kementerian utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbudristek) untuk sekolah umum, dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk madrasah dan pesantren. Pengakuan ini bersifat inheren karena posisi Islam sebagai agama mayoritas ⁷. Model pengakuan ini sesuai dengan konsep Afiriasi Terbatas ⁸, di mana negara secara konstitusional mengakui dan mendanai institusi berbasis agama, tetapi tetap mengontrol standar minimum kurikulum nasional. Pengakuan ini memberikan legitimasi formal yang kuat tanpa memaksa *full structural conformity*.

⁷ Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*.

⁸ Stepan, *Arguing Comparative Politics*.

Sebaliknya, di Australia, pengakuan dan pendanaan untuk sekolah Islam (sekolah non-pemerintah) dikondisikan pada kepatuhan penuh terhadap standar akreditasi sekuler yang ditetapkan oleh otoritas negara bagian (*State/Federal Acts*), seperti registrasi dan pemenuhan kurikulum inti nasional^{9 10}. Pengakuan ini adalah hasil dari akreditasi dan bukan pengakuan agama secara inheren. Hal ini menempatkan pendidikan Islam dalam kerangka integrasi paksa ke dalam sistem pendidikan yang dominan sekuler. Perbedaan status hukum ini memiliki implikasi signifikan terhadap tekanan isomorfik. Indonesia: Adanya dukungan negara melalui Kemenag secara efektif mengurangi tekanan Isomorfisme Koersif¹¹ terkait kurikulum inti dan struktur manajemen. Kemenag menjamin bahwa inti keagamaan (*madrasah/pesantren distinctive features*) diakui sebagai kurikulum yang sah, sehingga otonomi substansial keagamaan dapat dipertahankan.

Institusi Islam tidak perlu meniru struktur sekolah sekuler secara mutlak untuk mendapatkan legitimasi. Australia: Di sini, tuntutan kepatuhan akreditasi—yang dihubungkan langsung dengan pendanaan—berfungsi sebagai manifestasi kuat dari Isomorfisme Koersif. Lembaga harus mengadopsi struktur formal (manajemen, tata kelola, pelaporan akademik) yang hampir identik dengan sekolah sekuler untuk mendapatkan legitimasi dan pendanaan. Kegagalan untuk memenuhi standar sekuler berakibat pada penarikan registrasi dan pendanaan, yang merupakan bentuk sanksi koersif¹². Sekolah Islam dipaksa untuk menjadi 'sama' dengan sekolah sekuler untuk dapat bertahan.

Perbedaan dalam struktur pendanaan berfungsi sebagai mekanisme utama tekanan kelembagaan. Pendanaan berbasis kinerja (per-kapita siswa) di Australia bertindak sebagai tuas Isomorfisme Koersif yang lebih kuat, secara signifikan membatasi otonomi kurikulum pendidikan Islam dibandingkan dengan Indonesia. Pendanaan di Australia didasarkan pada model per-kapita siswa dari pemerintah federal dan negara bagian¹³. Model ini secara fungsional bertindak sebagai tuas Isomorfisme Koersif yang sangat efektif. Untuk memaksimalkan dana dan menjamin keberlanjutan, sekolah Islam harus menunjukkan hasil akademik yang setara atau lebih baik dari sekolah sekuler (misalnya, melalui tes standar seperti NAPLAN). Kebutuhan untuk 'membuktikan' kinerja ini memicu Isomorfisme Mimetik, di mana sekolah Islam meniru model kurikulum, metodologi pengajaran, dan struktur waktu sekolah yang berhasil di sekolah-sekolah sekuler berkinerja tinggi¹⁴. Hal ini secara drastis membatasi otonomi kurikulum; mata pelajaran agama (Islamic, Qur'an) cenderung diposisikan sebagai "ekstra-kurikuler" atau di luar

⁹ ACARA, "ACARA (Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority)."

¹⁰ Gidley, *Regulating Faith Schools in England and Australia: Comparison and Contrasts*.

¹¹ DiMaggio, P. J., & Powell, "The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields."

¹² Scott, *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities (4th Ed.)*.

¹³ ACARA, "ACARA (Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority)."

¹⁴ DiMaggio, P. J., & Powell, "The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields."

jam sekolah wajib agar tidak mengganggu waktu belajar untuk kurikulum nasional wajib yang akan diuji.

Meskipun ada alokasi anggaran, sistem pendanaan (terutama melalui Kemenag untuk madrasah/pesantren) secara eksplisit memungkinkan lembaga untuk mempertahankan kurikulum khas (misalnya, kajian *kitab kuning* di pesantren) sebagai inti, didukung oleh regulasi Kemenag (Pasal 28 UU Sisdiknas). Meskipun kurikulum umum tetap wajib, otonomi kurikulum di Indonesia relatif lebih tinggi di ranah keagamaan. Prioritas otonomi kurikulum di Indonesia adalah pada kedalaman substansi keagamaan, sementara di Australia, otonomi diprioritaskan pada efisiensi manajerial dan kepatuhan akreditasi kurikulum sekuler.

Tekanan isomorfik di Australia sangat didorong oleh mekanisme pendanaan. Untuk memenuhi standar, sekolah Islam harus mengalokasikan sumber daya ke area yang dinilai negara (kurikulum sekuler), sementara materi keagamaan menjadi *marginal*¹⁵. Di Indonesia, meskipun tekanan Isomorfisme Normatif (standarisasi oleh asosiasi profesi guru dan pendidikan tinggi) ada, afirmasi negara melalui Kemenag (Isomorfisme Koersif yang 'berlawanan' dengan yang terjadi di Australia) melindungi institusi dari keharusan menuju model sekuler sepenuhnya, menciptakan ruang aman untuk otonomi substantif¹⁶.

Analisis ini berfokus pada strategi adaptasi kelembagaan dalam konteks mayoritas vs. minoritas, yang mengkonfirmasi Lembaga pendidikan Islam di Australia mengadopsi Strategi Identitas Hibrida yang memaksanya memainkan Peran Ganda yang lebih akut untuk memastikan Preservasi Identitas dan legitimasi, dibandingkan dengan lembaga di Indonesia. Sekolah Islam di Australia mengadopsi Strategi Identitas Hibrida¹⁷. Peran utamanya adalah menjadi pusat Preservasi Identitas Islam di tengah masyarakat sekuler-liberal (minoritas). Hal ini memaksa mereka untuk memainkan Peran Ganda yang sangat menantang "Benteng" keagamaan: Mempertahankan ajaran, bahasa Arab, dan nilai-nilai Islam dari asimilasi. "Jembatan" akademik: Menyediakan hasil akademik yang unggul untuk menjembatani siswa ke pendidikan tinggi dan pekerjaan di masyarakat luas (guna mendapatkan legitimasi negara dan dukungan komunitas).

Tuntutan Peran Ganda ini menciptakan ketegangan internal yang konstan¹⁸. Di Indonesia Fokus lembaganya adalah pada Fungsi Tunggal yang Diperluas, yaitu mengintegrasikan pengetahuan umum dan agama. Karena identitas keislaman diasumsikan dan dijamin oleh lingkungan mayoritas, tekanan untuk *Preservasi* sebagai benteng tidak sekuat di Australia. Fokusnya bergeser dari *mempertahankan* identitas menjadi *memperluas* dan *memperdalam* implementasi nilai-nilai Islam dalam konteks pembangunan nasional. Dilema Integrasi vs. Preservasi¹⁹ jauh lebih akut dan sentral di Australia. Lembaga pendidikan Islam di sana harus secara sadar menyeimbangkan

¹⁵ Gao, Y., & Watts, "Funding and Policy for Religious Schools in Australia."

¹⁶ Scott, *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities* (4th Ed.).

¹⁷ McLoughlin, "Hybridity, Schools and the State: Muslims and the Negotiation of Educational Space in Britain and Australia."

¹⁸ Duderija, *The Muslim Identity Crisis in Australia*.

¹⁹ Berry, "Immigration, Acculturation, and Adaptation."

tuntutan komunitas (Preservasi) dengan tuntutan negara (Integrasi) agar berkelanjutan secara finansial dan legal. Ketegangan ini menghasilkan inovasi kurikulum dan manajemen yang unik untuk mengelola hybriditas.

Perilaku ini mencerminkan bagaimana konteks minoritas memaksa lembaga untuk menjadi lebih strategis dalam identitas mereka untuk memastikan legitimasi, sebagaimana dijelaskan oleh Teori Institusional²⁰. Strategi hibrida adalah mekanisme adaptasi isomorfik (mimikri dan normatif) yang strategis di mana lembaga secara selektif mengadopsi elemen sekuler (kurikulum) sambil mempertahankan *decoupled* inti ideologis (agama)²¹.

Tabel 1 . Perbandingan Lembaga Pendidikan

Dimensi Perbandingan	Indonesia (Kontek Mayoritas)	Australia (Kontek Minoritas)
Status Hukum	Dualisme Struktural (Kemenag & Kemendikbudristek)	Kepatuhan Sekuler (Akreditasi <i>State/Federal</i>)
Bentuk Isomorfisme	Isomorfisme Koersif (Afirmasi Negara) Rendah	Isomorfisme Koersif (Pendanaan/Akreditasi) Tinggi
Mekanisme Pendanaan	Afirmatif (Kemenag) & Reguler	Per-kapita Siswa (Terikat Kinerja)
Otonomi Kurikulum	Relatif Tinggi di ranah keagamaan (Inti Terjamin)	Sangat Terbatas (Agama seringkali "Ekstra-kurikuler")
Strategi Identitas	Fungsi Tunggal yang Diperluas (Integrasi)	Identitas Hibrida (Preservasi & Jembatan)
Dilema Sentral	Kualitas Pendidikan & <i>Depth of Integration</i>	Integrasi vs. Preservasi (Berry, 1997)

Institusionalisme, Identitas, dan Konteks Negara

Dalam kerangka Teori Institusional (Isomorfisme) dan Teori Identitas Minoritas, menunjukkan bahwa konteks sosiopolitik (mayoritas vs. minoritas) secara fundamental membentuk mekanisme Isomorfisme Koersif yang dihadapi lembaga pendidikan Islam, yang pada gilirannya mendefinisikan strategi identitas dan otonomi kurikulum mereka.

Tabel 2. Perbandingan Kurikulum

²⁰ Meyer, J. W., & Rowan, "Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony."

²¹ Scott, *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities* (4th Ed.).

Dimensi	Indonesia (Konteks Mayoritas & Afirmatif)	Australia (Konteks Minoritas & Sekuler)
Mekanisme Isomorfisme Dominan	Afirmasi Koersif Internal (Melalui Kemenag) yang melindungi inti keagamaan. Tekanan kuat pada Isomorfisme Normatif (profesionalisme).	Koersif Eksternal (Melalui Akreditasi/Pendanaan Sekuler) yang memaksa penyesuaian struktural. Tekanan kuat pada Isomorfisme Mimetik (peniruan kinerja).
Implikasi Kurikulum	Otonomi Substantif dijamin; Kurikulum khas (Keagamaan) dipertahankan sebagai Inti .	Otonomi Formal rendah; Kurikulum Keagamaan didorong ke Periferi/Ekstra .
Strategi Kelembagaan	Fungsi Tunggal Diperluas (Integrasi yang diasumsikan) – Fokus pada pendalaman/perluasan nilai.	Identitas Hibrida (Preservasi vs. Integrasi) – Peran Ganda sebagai Benteng dan Jembatan (Duderija, 2013).
Dilema Utama	Meningkatkan Kualitas Umum tanpa mengorbankan Kekhasan .	Mendapatkan Legitimasi & Pendanaan (Integrasi) tanpa kehilangan Identitas (Preservasi).

Secara esensial, Indonesia memberikan legitimasi *substantif* pada institusi Islam, sehingga tekanan isomorfik bergeser dari struktural-koersif menjadi normatif-profesional. Sebaliknya, Australia hanya memberikan legitimasi *formal* (berdasarkan kinerja sekuler), sehingga tekanan isomorfik yang kuat dan bersifat koersif-struktural mendominasi, memaksa institusi mengadopsi struktur hibrida sebagai strategi bertahan hidup.

Temuan komparatif ini menawarkan panduan kebijakan penting, terutama bagi lembaga dan regulator di kedua negara. Standardisasi Mutu Non-Sekuler: Karena Isomorfisme Koersif (afirmasi negara) telah melindungi otonomi kurikulum, tantangan Indonesia adalah Isomorfisme Normatif²². Kebijakan harus fokus pada peningkatan standar profesionalisme guru dan manajer madrasah/pesantren, khususnya di bidang non-agama (sains/matematika), tanpa mengurangi kurikulum inti Islam. *Rekomendasi*: Mengembangkan program sertifikasi guru yang mengintegrasikan pedagogi modern dengan kekhasan madrasah/pesantren (misalnya, metodologi pengajaran *kitab kuning* yang inovatif). Mendefinisikan Ulang "Dualisme" menjadi "Integrasi: Daripada melihat Kemenag dan Kemendikbudristek sebagai dualisme, kebijakan harus bertujuan pada kesetaraan output dan transfer kredit yang mulus. *Rekomendasi*: Kebijakan penyetaraan

²² DiMaggio, P. J., & Powell, "The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields."

lulusan pesantren dan madrasah harus terus diperkuat, memastikan bahwa otonomi kurikulum tidak berarti isolasi dari dunia kerja/pendidikan tinggi umum.

Penguatan Karakter Khas (Distinctive Feature): Otonomi kurikulum di Indonesia adalah aset. Kebijakan harus mendorong madrasah untuk menggunakan otonomi ini secara strategis untuk menciptakan nilai tambah yang unik, bukan hanya meniru sekolah umum (Isomorfisme Mimetik). *Rekomendasi:* Pemberian insentif dan *block grant* untuk pengembangan kurikulum tematik yang menggabungkan pendidikan agama dengan isu-isu kontemporer (misalnya, lingkungan, teknologi, atau kewirausahaan berbasis syariah).

Pengakuan Substansi Kelembagaan: Kebijakan akreditasi harus mempertimbangkan sifat ganda sekolah Islam. Saat ini, kepatuhan struktural adalah kriteria utama. Pemerintah harus mempertimbangkan metrik penilaian yang memungkinkan akomodasi kurikulum agama sebagai bagian inti dari pendidikan, bukan hanya *add-on* atau ekstrakurikuler²³. *Rekomendasi:* Menganalisis model pendanaan di negara lain (misalnya, Kanada atau beberapa negara Eropa) yang memberikan pengakuan finansial atas kurikulum berbasis keyakinan (Stepan, 2001) untuk mengurangi tekanan Koersif-Mimetik. Mendukung Strategi Hibrida: Karena sekolah Islam harus memainkan Peran Ganda sebagai "jembatan" dan "benteng," kebijakan pendanaan dan pengembangan kapasitas harus mendukung upaya mereka dalam mengelola ketegangan ini (Duderija, 2013). *Rekomendasi:* Program pengembangan profesional yang ditargetkan untuk kepala sekolah dan guru di sekolah non-pemerintah berbasis agama, berfokus pada manajemen keragaman kurikulum dan integrasi identitas.

Strategi Dekopling (Decoupling) yang Cerdas: Lembaga di Australia harus menggunakan strategi *decoupling* (Meyer & Rowan, 1977) secara cerdas. Mereka harus memenuhi tuntutan formal (laporan, hasil tes standar) tetapi melindungi inti ideologis (pengajaran agama) dari pengaruh Isomorfisme Mimetik yang merusak. *Rekomendasi:* Melakukan audit internal untuk mengidentifikasi area yang harus dipatuhi secara ketat (misalnya, keselamatan, kurikulum inti sekuler) dan area di mana otonomi dapat dipertahankan (misalnya, filosofi pengajaran Islam, penguatan identitas di luar kelas formal).

Meningkatkan Legitimasi Melalui Kinerja: Dalam konteks minoritas, bukti kinerja akademik yang unggul adalah bentuk legitimasi non-koersif yang paling kuat. Kebijakan internal sekolah harus terus memprioritaskan hasil akademik (Isomorfisme Mimetik yang strategis) agar tuntutan pendanaan dan kepatuhan dapat terpenuhi dengan mudah. Hal ini akan mengurangi kebutuhan untuk memilih antara Preservasi dan Integrasi (Berry, 1997).

²³ Gao, Y., & Watts, "Funding and Policy for Religious Schools in Australia."

PUSTAKA

- Acara. "ACARA (Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority).," 2024.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2012.
- Baga, Fethi. *Islamic Schools in Australia: A Study of Identity, Regulation and Community*. Melbourne: Melbourne University Press, 2017.
- Berglund, Jenny. "Islamic Education in Secular Societies: A Comparative Perspective." *Springer*, 2021.
- Berry, J. W. "Immigration, Acculturation, and Adaptation." *Applied Psychology: An International Review* 46, no. 1 (1997): 5–68.
- Bouma, Gary D. "Being a Muslim in Australia: Diverse, Negotiated and Contested." *Australian Multicultural Foundation*, 2011.
- Bull, Ronald. *A Peaceful Jihad: Negotiating Modernity and Modernism in Muslim Education in Indonesia*. New York: Palgrave Macmillan, 2005.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. "The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields." *American Sociological Review* 48, no. 2 (2019): 147–60.
- Duderija, A. *The Muslim Identity Crisis in Australia*. Ashgate Publishing., 2013.
- Gao, Y., & Watts, R. "Funding and Policy for Religious Schools in Australia." *International Studies in Sociology of Education* 27, no. 2 (2018): 160–78.
- Gidley, B. *Regulating Faith Schools in England and Australia: Comparison and Contrasts*. Routledge: Faith-Based Schools and the State., 2013.
- Hefner, R. W. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton University Press, 2020.
- McLoughlin, S. "Hybridity, Schools and the State: Muslims and the Negotiation of Educational Space in Britain and Australia." *Journal of Intercultural Studies* 36, no. 4 (2015): 361–77.
- Meyer, J. W., & Rowan, B. "Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony." *American Journal of Sociology* 83, no. 2 (2020): 340–63.
- Sahin, Abdullah. *New Directions in Islamic Education: Pedagogy and Identity Formation*. Markfield: Kube Publishing, 2018.
- Scott, W. R. *Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities (4th Ed.)*. Sage Publications., 2014.
- Stepan, A. *Arguing Comparative Politics*. Oxford University Press, 2011.